

Problematika Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan

Syahril Ramazan

Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UINAR)

(email: 190405058@student.ar-raniry.ac.id)

Abstract

This study is entitled Problems of Social Welfare Services in Trumon District, South Aceh Regency. Problems of social welfare services are a problem that often occurs in all processes of social welfare services to the community, including in Trumon District, South Aceh Regency. This study aims to determine the problems, obstacles, and solutions to the problems of social welfare services in Trumon District. The research method used in this study is qualitative with data sources from in-depth interviews and participatory observations of the South Aceh District Social Service, Trumon District Government, Kasi Puspelkesos Trumon, TSKS Trumon, Imum mukim and other related parties as well as documentation as a source of strengthening research in Trumon District. The results of this study indicate that various problems of social welfare services in Trumon District have fundamental problems, namely the absence of professional social workers in providing social welfare services. This has implications for all aspects of service, both in terms of communication, handling, and service in the context of social welfare. The obstacles that occur lead to the government's attention sector which is very minimal in the form of budget and logistics. The solution to the problems that occur is the need for reform in terms of the placement of service human resources so that social welfare services in the Trumon sub-district occur properly, apart from that the government is required to provide full service to social welfare.

Keywords: Problems, Services, Social Welfare

Pendahuluan

Salah satu tujuan berdirinya Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alenia ke-4 yaitu "Memajukan Kesejahteraan Umum" Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai hal terkait permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan publik menjadi tantangan

tersendiri. Dikemukakan oleh Midgley et.al. bahwa kesejahteraan sosial sebagai *"a condition or state of human well-being"*. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya segala kebutuhan Material dan Spiritual dalam menjalankan pemenuhan hak-hak sosial nya. Kesejahteraan sosial ini bermaksud dan berasaskan kepada semua orang sama dalam pemenuhan hak-hak sosialnya tanpa melihat pada Gender, Etnis, Suku, dan golongan ekonomi. Kesejahteraan sosial tersebut menjunjung tinggi prinsip prinsip keadilan dan kesetaraan dalam segala kehidupan sosialnya tanpa adanya pemisahan. Sehingga kesejahteraan sosial ini menjadi salah satu aspek yang paling penting dipenuhi dalam konteks Pemenuhan kesejahteraan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Ke-4. Dalam konteks keislaman Allah SWT secara lugas menyampaikan tentang teori kesejahteraan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam surah Hud ayat 6 yang artinya *"Dan tidak ada satupun hewan melata-pun di bumi melainkan Allah yang memberikan Rezekinya"* namun rezeki yang diberikan oleh Allah SWT harus juga dilandaskan pada usaha dan kerja keras dari makhluk sebagaimana yang dimaksud dalam Surah Ar-ra'd Ayat 11 yang artinya *" Allah Swt tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*. Dari dua firman Allah SWT di atas dapat kita lihat yang bahwasanya Islam mengatur dengan begitu kompleks tentang pemenuhan kebutuhan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sehingga sangat menguatkan sebuah teori yang bahwasanya kesejahteraan sosial adalah salah satu aspek kebutuhan hidup dan berkehidupan yang sangat harus di penuhi. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke-4 tentu yang berperan penting dalam terwujudnya kesejahteraan sosial adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) dan tingkat II (Kabupaten) terkhusus pada tingkat Kecamatan yang menjadi pembuat dan pelaksana kebijakan tentang pemenuhan kesejahteraan sosial. Pada tingkat pemerintahan pusat stake holder utama dalam pemenuhan Kesejahteraan Sosial adalah Kementrian sosial, pada pemda tingkat I dan Tingkat II adalah Dinas Sosial, sedangkan pada tingkat Kecamatan Merupakan

PUSPELKESOS (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Salah satunya adalah PUSPELKESOS yang ada di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Trumon merupakan suatu Kecamatan yang memilki luas menurut Badan Pusat Statistik Aceh (BPS Aceh) Tahun 2022 adalah 765,92 Km² per tahun 2022. Kecamatan Trumon ini memiliki populasi penduduk sebanyak Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (BPS Aceh) berjumlah 6.105 jiwa (Enam ribu seratus lima jiwa) dengan persebaran desa berjumlah 12 desa yaitu, Panton bilie, Kuta baroe, Keude Trumon, Ujong Tanoh, Sigleng, Kuta Padang, Ie meudama, Ule Raket, Teupin tinggi, Gampong Teungoh, Seuneubok Jaya, UPT II Padang harapan.

Jika melihat indikator kesejahteraan sosial menurut BPS dan Kemensos sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas maka kondisi kesejahteraan sosial di Kecamatan Trumon memiliki beberapa kekurangan dalam pemenuhan kesejahteraan sosial. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator kesejahteraan yang belum terpenuhi, seperti kondisi tempat tinggal masyarakat kecamatan Trumon merupakan suatu kecamatan yang berada di pesisir Pantai sehingga rawan terjadinya Tsunami, dan juga Ada 3 Desa (UPT II Padang Harapan, Sigleng, dan Ujong Tanoh) Merupakan daerah rawan banjir, sehingga sangat perlu adanya sebuah sarana dan prasarana dalam pemenuhan langkah-langkah mitigasi bencana. Namun, tercatat di kecamatan Trumon tidak memiliki satupun sarana dan prasarana seperti sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini bencana alam, dan perlengkapan keamanan ketika ada bencana. Padahal proses mitigasi bencana merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen bencana. Manajemen bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan resiko yang mungkin terjadi dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana itu terjadi Manajemen bencana terdiri dari dua tahap yaitu ex-ante (sebelum terjadi bencana) dan ex-past (setelah terjadi bencana).

Kemudian pada sektor kesehatan, Kecamatan Trumon juga memiliki PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Data terakhir Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) pada tahun 2023 anak dengan Disabilitas berjumlah 7 orang, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Kejiwaan) berjumlah 9 orang dan Disabilitas berjumlah 18 orang. Tentu dalam hal ini Puspelkesos sebagai sub sektor yang membidangi tentang kesejahteraan sosial masyarakat yang berperan penting pada level kecamatan Trumon juga di bantu oleh pilar-pilar kesejahteraan sosial lainnya Seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Personel Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Trumon. Masalah lain yang terjadi adalah Pekerja sosial yang tidak memiliki latar belakang akademik korelasi dengan kesejahteraan sosial, misalnya Penempatan kasi puspelkesos yang bukan merupakan sosok memiliki latar belakang akademik daripada Ilmu kesejahteraan sosial sehingga patut diragukan kapabilitas nya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada dalam kecamatan trumon. minimnya pekerja sosial profesional ini menjadi masalah yang sangat sentral terjadi di kecamatan trumon. Padahal dalam Undang-Undang No 14 tahun 2019 menyebutkan Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang memiliki sertifikat lisensi dan memiliki latar belakang akademik dengan ilmu kesejahteraan sosial. Seharusnya penempatan tenaga yang membidangi pada kesejahteraan sosial ini harus pada sosok-sosok yang memiliki kompetensi dan latar belakang akademik sehingga pelayanan kesejahteraan sosial ini memiliki sifat Efektif, efisien, dan Kompleksitas.

Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yanna Zega dalam *"Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli"*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli mengenai Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yang berjudul *"Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Miskin"* sebagai berikut : Program kelompok usaha bersama Desa Humene terdiri dari 3

kelompok yakni KUBE Sejahtera, Sentosa, dan Makmur yang anggota dari keluarga miskin dan pekerjaan ibu rumah tangga dengan usaha bertani atau berkebun. Kelompok usaha bersama di Desa Humene telah berjalan kurang lebih 1 tahun, namun beberapa bulan terakhir pada saat peneliti turun lapangan menunjukkan usaha kelompok tidak berjalan secara efektif dimana memiliki banyak kendala yang tidak dapat diatasi oleh kelompok. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arfi Fahreza *"Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Lembaga SOS And Children's Village Village"* Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk dan proses pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar pada Lembaga SOS Children's Villages Banda Aceh. Terdapat 4 bentuk atau proses pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar yaitu : Family Base Care (pengasuhan berbasis keluarga), Lembaga SOS Children's Villages memastikan anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua memiliki rumah, Ibu, Kakak, dan Adik selayaknya sebuah keluarga, dan komunitas yang berbentuk SOS Villages sehingga membuka kesempatan untuk masa depan yang baik bagi setiap anak. Family strengthening program, Lembaga SOS Children's Villages yang bekerja sama dengan komunitas-komunitas di sekitar SOS Villages dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kondisi yang menyebabkan anak-anak terpisah dari orangtuanya terutama karena faktor ekonomi. Kindship Care (pengasuhan kekerabatan), melibatkan anak-anak yang diasuh oleh keluarga besarnya atau dengan teman dekat dari keluarga yang dikenal anak tersebut. Foster Care yaitu anak yang di adopsi atau pengasuhan sementara oleh orangtua pengganti dengan kontrak.

Metode

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Problematika Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh selatan, Penelitian ini didapat dari wawancara dan Observasi lapangan, Informasi didapat dari narasumber dengan sistem wawancara langsung. Obyek penelitian ini adalah unsur

pemerintahan di kecamatan Trumon yang terkait dengan Topik Penelitian, Pilar-Pilar Pelaksana pelayanan Kesejahteraan sosial, dan Tokoh Masyarakat. Penelitian ini di lakukan pada tiga Gampong dari tiga kemukiman yang ada di Kecamatan Trumon.

Problematika Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Peneliti melihat di kecamatan trumon pelayanan kesejahteraan sosial tidak serius dilakukan hal ini dibuktikan ketika peneliti hendak mengajukan permintaan data terkait pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pemerintah kecamatan tidak dapat memberikan datanya dengan alasan data yang tidak bisa terupdate, padahal menurut pengakuan kepala dinas sosial kabupaten aceh selatan di tiap gampong ada prg (petugas registrasi gampong). Stake holder terkait kurang memahami konteks pelayanan kesejahteraan sosial tksk maupun kasi puspekesos kurang memahami konteks pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini peneliti ucapkan dikarenakan saat peneliti melakukan diskusi tentang teori-teori kesejahteraan, teori nilai-nilai pekerjaan sosial, nilai-nilai pelayanan sosial termasuk konsep manajemen kasus dalam penanganan ppks kedua sosok tersebut mengakui secara langsung kurang terpahami terkait hal tersebut. Tksk yang di tuntutan memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam hanya diberikan gaji perbulan sebesar rp. 1.700.000 hal ini tentunya berdampak pada tidak adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi kepada tksk, sehingga tksk harus mencari pemasukan ekonomi pada sumber lainnya dan hal tersebut mengganggu proses kerja tksk sendiri. Komunikasi merupakan suatu hal yang memiliki urgenistas dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini peneliti melihat ketidaksesuain komunikasi antar tksk dengan aparatut pemerintahan gampong terlebih dalam kesepahaman penginputan data ppks.

Hambatan Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Dalam memenuhi perannya Dinas sosial kabupaten Aceh Selatan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya

pelayanan kesejahteraan sosial terkhusus di kecamatan Trumon pada khususnya yang sering terjadi bencana alam, namun dalam proses perjalanan pelayanan tersebut memiliki hambatan yang sangat signifikan dalam beberapa segi seperti stok kebutuhan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam. Hambatan tersebut tak cukup berhenti sampai disitu saja, banyak hambatan lainnya yang terjadi termasuk dalam segi penyediaan anggaran untuk Dinas sosial yang masih sangat minim sehingga berdampak pada fasilitas yang memadai dalam penanganan bencana dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Solusi Terhadap Permasalahan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Setiap permasalahan dan hambatan yang ada pelayanan kesejahteraan tentu diperlukan solusi yang konkret dan efektif. Kepala dinas sosial kabupaten Aceh selatan menyatakan di kecamatan Trumon sendiri harus adanya perhatian penuh bukan hanya dari pemerintah Tingkat kabupaten tapi harus langsung tersentuh perhatian dari pemerintah provinsi dan pusat.

Pembahasan

Problematika Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Sedangkan pelayanan kesejahteraan sosial merupakan suatu Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Fungsi dari pelayanan kesejahteraan sosial adalah sebagai pelayanan akses kepada sumber-sumber untuk penyelesaian penyelesaian permasalahan, rehabilitasi sosial termasuk juga perlindungan sosial, jaminan sosial; serta pemberdayaan sosial. Cakupan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi bidang yang sangat luas. Bidang tersebut seperti

bidang bantuan sosial, pelayanan kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, pemeliharaan pendapatan, bantuan makanan dan lain sebagainya. Berusaha memahami kebutuhan konsumen Petugas harus cepat tanggap apa yang diinginkan konsumen, mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen merupakan salah satu kunci adanya pelayanan yang masuk dalam kategori baik. Namun dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di kecamatan Trumon bertolak belakang dengan teori tersebut, berikut peneliti cantumkan beberapa hal yang memiliki kontradiktif dengan konsep pelayanan kesejahteraan sosial. Peneliti sangat tertarik dengan jawaban para pihak terkait (Kadinsos dan Camat) ketika peneliti tanyai terkait dengan Indikator kesejahteraan sosial, Kusaifuddin selaku kadinsos menyatakan "Tergantung Anggaran yang ada, jika anggaran masuk maka pelayanan kesejahteraan pasti akan terjadi". Sedangkan Bahari selaku camat kecamatan trumon menyatakan "indikator adanya kesejahteraan tersebut terpenuhinya segala fasilitas yang mumpuni". Tentu jawaban dari kedua pihak ini sangat bertolak belakang dengan indikator kesejahteraan sosial yang lazim pada umumnya sebagaimana yang telah di paparkan oleh Kementrian sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut peneliti sendiri ketidakpahaman terkait indikator kesejahteraan sosial ini menjadi problematika yang sangat serius, hal ini dikarenakan jika tidak memahami tentang indikator kesejahteraan sosial maka target pelayanan kesejahteraan tidak akan mencapai pada titik yang sempurna dikarenakan tidak ada target yang harus di penuhi. Idealnya TKSK dan Puspelkesos di isi oleh pekerja sosial professional yang mumpuni dan paham terkait segala hal yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk menjadi seorang pekerja sosial professional harus mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh kementrian sosial yang di atur dalam undang-undang No 34 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial pasal 20-23 menyatakan dengan jelas bahwasanya pekerja sosial professional didapat dengan adanya latar belakang akademik ilmu kesejahteraan sosial, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Tapi pada perjalanannya di kecamatan trumon sendiri TKSK memiliki latar akademik ilmu hukum dan puspelkesos berlatar

akademik ilmu pemerintahan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan produk hukum yang ada. Mampu Melayani secara cepat dan tepat Dalam melayani konsumen diharapkan petugas harus melakukannya sesuai prosudur. Layana yang diberikan sesuai jadwal dan pekerjaan tentunya jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan konsumen merupakan salah satu bentuk pelayanan yang baik sebagaimana yang di tulis dalam buku paradigma pelayanan publik.

Peneliti mencoba menkomfrontasi terkait hal tersebut dengan kepala dinas sosial kabupaten aceh selatan namun kadinsos memberikan jawaban yang sangat tidak rasional. “Dinas sosial pasti mengikuti hal yang sudah menjadi produk hukum, akan tetapi untuk saat ini kriteria tersebut belum dapat terpenuhi”¹. Sebuah jawaban dari kepala dinas sosial Aceh selatan yang membuat peneliti ambigu karna merasa jawaban yang diberikan tersebut terkesan kontradiktif. Hal tersebut menguatkan keyakinan peneliti bahwasanya problematika pelayanan kesejahteraan sosial di kecamatan trumon sangatlah miris dan memprihatinkan. Terkait dengan kesesuaian akademik ilmu kesejahteraan sosial tentu sangatlah penting dalam pelayanan keesejahteraan sosial ini guna mencapai pelayanan kesejahteraan sosial yang prima, bersebab jika pekerja sosial professional berlatar belakang akademik kesejahteraan sosial maka peksos tersebut akan memahami dikarenakan sudah melewati segala proses akademik sehingga terpahami tentang konteks pelayanan kesejahteraan sosial.

Hambatan Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Hambatan seringkali dapat berupa kondisi atau objek fisik yang menghalangi pergerakan atau kemajuan seseorang. Selain daripada Problematika yang berimplikasi terhadap hambatan pelayanan kesejahteraan sosial, hambatan lainnya yang terjadi juga berasal dari adanya pergolakan politik yang bisa merusak tatanan logis dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Pergolakan politik bukan

hanya menjadi hambatan Tunggal, ada persoalan anggaran yang menjadi titik sentral dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Ketika anggaran yang tidak di alokasikan dalam pelayanan sosial maka akan menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan akan terhambat sehingga berdampak pada pelayanan kesejahteraan sosial. Hambatan dalam pelayanan kesejahteraan sosial merupakan titik sentral permasalahan yang harus segera diselesaikan, bersebab hadirnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat merupakan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya.

Ironis rasanya melihat hambatan pelayanan kesejahteraan sosial selalu terus menerus menjadi permasalahan yang tak kunjung usai dan selalu menjadi tantangan sehingga pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat selaku komsumsi pelayanan publik tidak terasa. Kekurangan logistik dalam upaya penyaluran bantuan terhadap masyarakat kecamatan Trumon yang terdampak bencana alam (Banjir) menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, di tengah kesesangsaraan psikologis yang di rasakan oleh masyarakat akibat bencana alam yang terjadi, masyarakat harus menerima masalah baru yakni tidak mendapat bantuan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan obat-obatan yang bersebab lamban nya dinas sosial memberikan bantuan akibat kekurangan stok di gudang logistik.

Selain dari kekurangan logistik, stigma masyarakat selaku objek pelayanan terhadap TKSK kadang kala tidak obyektif, segala hal permasalahan yang bukan garis kerja daripada TKSK menjadi hal yang harus di tampung oleh TKSK bersebab masyarakat mengadukan segala permasalahan sosial kepada TKSK seperti bantuan sembako, PKH, dan Bansos yang bukan termasuk dalam ranah naungan TKSK.

Solusi Terhadap Permasalahan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Merunut dari jawaban informan penelitian menawarkan solusi erkait problematika yang ada dari segi pemenuhan fasilitas dan penambahan anggaran bukanlah solusi sentral daripada problematika tersebut, menurut peneliti solusinya adalah

penempatan TKSK dan Puspelkesos di isi oleh sosok yang berkompeten dalam pelayanan kesejahteraan sosial, dalam hal ini adalah sosok yang memiliki latar belakang akademik kesejahteraan sosial. Hal ini dikarenakan seorang yang memiliki latar belakang akademik akan terlatih dan paham dengan konsep pelayanan kesejahteraan sosial sehingga pelayanan yang diberikan bersifat prima dan efektif. Selain daripada hal tersebut solusi yang harus di hadirkan adalah harus terciptanya kesejahteraan terhadap sdm pelayanan sosial, dan membuat satu mekanisme data satu pintu supaya dalam proses penginputan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tersebut terikat dalam satu kesatuan.

Kesimpulan

Problematika pelayanan kesejahteraan Sosial di kecamatan Trumon memiliki beberapa hal yang bersifat kontradiktif dengan konsep pelayanan kesejahteraan sosial adalah ketidakpahaman pihak terkait dengan kesejahteraan sosial dan tidak adanya pekerja sosial profesional di kecamatan trumon. Hambatan yang terjadi dalam pelayanan kesejahteraan sosial di kecamatan trumon adalah Selain daripada Problematika yang berimplikasi terhadap hambatan pelayanan kesejahteraan sosial, hambatan lainnya yang terjadi juga berasal dari adanya pergolakan politik yang bisa merusak tatanan logis dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Pergolakan politik bukan hanya menjadi hambatan Tunggal, ada persoalan anggaran yang menjadi titik sentral dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Solusi terhadap problematika pelayanan kesejahteraan sosial di kecamatan trumon penempatan TKSK dan Puspelkesos di isi oleh sosok yang berkompeten dalam pelayanan kesejahteraan sosial, dalam hal ini adalah sosok yang memiliki latar belakang akademik kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

Abdul mahsyar. "Masalah pelayanan public di indonesia dalam perpekstif admistrasi public" *Jurnal ilmu Pemerintahan*, 2008. Vol 26.3. hal. 12

- Afifah Nurul, Wijayanti ([Problematika pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19](#)) dalam "Problematika pendidikan di Indonesia." *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 1.1 (2017): hal. 21
- Amelia, C. *Problematika pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Salemba Publishing 2009
- Albi Anggito Dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: CV. Jejak, 2018),
- Andi Nu Graha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 5 hal. 21
- Badan Pusat Statistik Aceh, Kecamatan Trumon Dalam Angka 2022, (Tapak tuan: BPS Aceh selatan, 2022)
- Fitri yanna Zega "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli" Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017
- Hidayatulah Himawan, *Efektifitas Tata Kerja Pendataan Kepegawaian Dalam Mewujudkan Good Governance*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021
- Hayat, Hayat. "Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik." *Aristo* 8.1 (2020): hal. 26
- Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 03 Maret 2023
- M Agustina, H Saputra, Sikap Masyarakat Terhadap (ODGJ) Orang Dengan Gangguan Jiwa: Analisis Sikap Masyarakat Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*, 2023
- Iqbal, M. (2013). *Pelayanan yang memuaskan*. Elex Media Komputindo.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 20.2 (2015): Hal 243-260

Nurul Hidayat, *Pendampingan Untuk Menghidupkan Keberlangsungan Petani Karet Di Desa Sungai Kunyit*, UIN Sunan Ampel. 2015

Munir, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Maulidiah, S. *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*. (2014).

Moleong, Lexi J., And P. R. R. B. Edisi. "Metodelogi Penelitian." *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* (2004).

M. Arfi fahreza "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Lembaga SOS And Children's Village Village" Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2022

Maryani, Dedeh, And Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish, 2019

Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-4

Prasodjo, T. (2017). Paradigma humanis dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), hal 38-39.

Sabarisman, Muslim. "Peluang Dan Tantangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1.1 (2015).

Setiawan, Hari Harjanto. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 3, No. 3 (2017), Hal 13-16

Sriyana, S. S. M. S. *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021. Hal, 16

Suhendi, Ahmad. "Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 18.2 (2013).

Undang-Undang NO 14 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Yamin, M. Syukron, And Muhammad Zikri. *Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan (Studi Di Dinas Sosial Kota Medan)*. Diss. UMSU, 2021

Yusuf, A. Muri. "Metodelogi Penelitian." *Padang. Padang: UNP Pers* (2005).